

**MELACAK PROSES MODERNISASI PERGURUAN TINGGI ISLAM:
STUDI KASUS DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUNAN
AMPEL SURABAYA 1973-2013**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)
Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)



Oleh :

Davit

A02215004

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Davit

NIM : A02215004

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 28 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Davit

A02215004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Davit (A02215004) dengan judul “Melacak Proses Modernisasi Perguruan Tinggi Islam: Studi Kasus di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya 1973-2013” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 28 Juni 2019

Pembimbing,



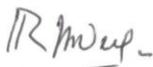
Rochimah, M. Fil. I

NIP. 196911041997032002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 22 Juli 2019

Ketua/Penguji I



Hj. Rochimah, M. Fil. I.
NIP. 196911041997032002

Penguji II



Dr. H. Imam Ghazali, MA
NIP. 1960021219900312002

Penguji III



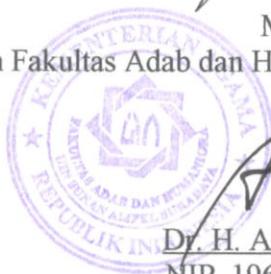
H. M. Khodafi, M. Si
NIP. 197211292000031001

Sekretaris / Penguji IV



Dwi Susanto, MA
NIP. 197712212005011003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya




Dr. H. Agus Aditoni, M. Ag
NIP. 196210021992031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Davit
NIM : A02215004
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam
E-mail address : davit.gb@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Melacak Proses Modernisasi Perguruan Tinggi Islam: Studi kasus
di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel
Surabaya 1973-2013

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

Davit

(
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada proses modernisasi di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Melacak Proses Modernisasi Perguruan Tinggi Islam: Studi Kasus di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya 1973-2013”. Dengan fokus permasalahan : (1) Bagaimana profil Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya? (2) Bagaimana proses modernisasi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya? (3) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi modernisasi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya?.

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode penelitian sejarah yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi pendidikan dan teori sistem yang diadaptasi oleh Azyumardi Azra dari Don Adams. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah variabel dalam menentukan modernisasi di dunia pendidikan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berdiri pada tahun 1965. Adapun saat ini (2019), UIN Sunan Ampel sudah mempunyai 9 fakultas dan Program Pascasarjana, dengan terdiri dari 58 program studi yang diantaranya 44 program studi Sarjana, 10 program studi Magister, dan 4 program studi Doktorat. (2) Proses panjang modernisasi yang terjadi di IAIN Sunan Ampel adalah berawal dari pengayaan pengetahuan bahasa asing bagi mahasiswanya. Kemudian muncul *Wider Mandate*, yang akhirnya ditindak lanjuti dengan konversi IAIN menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. (3) Latar belakang yang menjadi dasar modernisasi di IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah adanya tantangan zaman sebagai dampak dari perkembangan zaman dan terdapatnya paradigma keilmuan yang terjadi di kalangan Intelektual Muslim serta tuntutan masyarakat dan dunia kerja yang melanda kehidupan di masyarakat.

Setelah beberapa tahun STI berjalan kembali, muncul sebuah ide untuk merubah status STI menjadi universitas. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan ruang lingkup jangkaun STI di dunia pendidikan. Pada akhirnya, tepat tanggal 22 Maret 1948, ide atau gagasan tersebut benar-benar terwujud dengan berubahnya STI menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Dengan mempunyai 4 fakultas yang diantaranya, yakni; Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan.

Tak berselang lama, setelah perubahan perguruan tinggi Islam tersebut, yang bertepatan pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia memberikan sebuah penghargaan bagi Kota Yogyakarta menjadi kota pendidikan, yang disebabkan akan ketersediannya menjadi pusat pemerintahan sementara Republik Indonesia. Di samping itu, bagi golongan/kelompok, baik Nasionalis Islam maupun Nasionalis Sekuler yang juga ikut berjuang pada masa revolusi Indonesia saat itu. Maka, oleh pemerintah Indonesia bagi golongan Nasionalis Sekuler diberikan sebuah hadiah dengan dirubahnya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada (BPTGM) yang berstatus swasta sebelumnya menjadi universitas berstatus negeri (sekarang bernama Universitas Gajah Mada) berdasarkan Peraturan Presiden No. 37 tahun 1950.

Demikian pula, bagi golongan Nasionalis Islam yang juga mendapatkan sebuah hadiah dengan perubahan status Fakultas Agama yang sebelumnya dibawah pengelolaan UII menjadi Perguruan Tinggi Agama

yang sebenarnya meliputi segala bidang keilmuan dan terkait kehidupan di dalam masyarakat.

Bersamaan dengan hal tersebut, pada tanggal 5 Juli 1959 muncul Dekrit Presiden yang menyatakan tentang pembubaran Badan Konstituante dan penggantian Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) kembali ke UUD 1945. Adapun dalam perwujudannya adalah merupakan sebuah kebebasan bagi umat Islam untuk mengekspresikan dirinya di kanca nasional, sehingga hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya".

Berdasarkan hal tersebut, sehingga menjadi dorongan psikologis bagi para pengelola PTAIN untuk lebih menyempurnakan PTAIN dan untuk semakin dikembangkan menjadi perguruan tinggi Islam yang lebih baik dengan disesuaikan pada ke-Indonesiaan. Sehingga, dari sini dibentuklah sebuah panitia dengan nama "Panitian Perbaikan PTAIN", yang diketuai langsung oleh Prof. Mr. R.H.A Soenarjo.

Dari sana, kemudian dilakukan sebuah diskusi forum atau sidang secara keberlanjutan, sehingga akhirnya muncul keputusan yang juga disetujui oleh Menteri Agama yang saat itu di jabat oleh KH. M. Wahib Wahab untuk mengembangkan lembaga perguruan tinggi Islam. Bentuk usaha tersebut adalah dengan mengupayakan terjadinya penyatuan bagi kedua institusi pendidikan antara ADIA dengan PTAIN ke dalam satu wadah

agama lain yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Terutama pada saat itu juga terdapat beberapa diantara golongan Nasionalis Sekuler yang secara terang-terangan menolak perubahan kedua lembaga perguruan tinggi Islam tersebut menjadi berstatus negeri. Hingga suatu hari muncul kesempatan, sewaktu Presiden Soekarno sedang melakukan perjalanan ke negeri sakura (Jepang), KH. Wahib Wahab bersama dua orang stafnya, Kolonel (Pur.) Iskandar Sulaiman dan Letkol (Pur.) Sullam Syamsun, menemui Perdana Menteri Ir. Djuanda untuk membicarakan dan meminta dukungannya terkait gagasan pembentukan IAIN. Setelah melalui dialog yang cukup panjang, akhirnya Ir. Djuanda memahami dan menyetujui maksud mulia dari KH. Wahib Wahab.

Pada tanggal 9 Mei 1960, akhirnya keluar SK Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960, yang berisi ijin pembentukan IAIN dengan ditanda tangani secara langsung oleh Ir. Djuanda. Tidak berselang lama, kemudian Presiden Soekarno kembali dari Jepang, dan akhirnya ia mengetahui tentang SK ijin pendirian IAIN sebagai perguruan tinggi Islam negeri. Setelah mengetahui hal itu, maka, Presiden Soekarno memanggil Ir, Djuanda dan KH. Wahib Wahab, dan ia sempat marah dihadapan keduanya dengan mengatakan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah setuju kalau ADIA itu menjadi negeri. Tetapi, setelah dijelaskan dengan seksama, termasuk perlunya keseimbangan antara kekuatan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler, maka, Presiden Soekarno mulai memahami hal itu dan menyetujuinya pendirian IAIN.

Setelah peristiwa diatas, maka, KH. Wahib Wahab, mulai melakukan langkah selanjutnya dengan meminta bantuan terhadap Prof. Mr. Soenarjo, untuk mencari dukungan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Priyono. Berdasarkan hal itu, akhirnya dibentuk sebuah panitia yang beranggotakan di antaranya: Prof. Muchtar Yahya, Prof. Hasbi Assidiegy, KH. Fathurrahman Kafrawi, Prof. Bustani A. Gani dan Prof. Mahmud Yunus untuk bertugas dalam menangani proyek pendirian IAIN,¹⁶ yang dengan terbagi atas 3 seksi; seksi teknis, seksi formasi/personalia dan seksi administrasi/perlengkapan.

Panitia ini akhirnya bertindak secara dinamis, dengan kemudian diadakan sebuah rapat pleno di Ciputat, Jakarta, pada tanggal 8 Juni, dan dengan bersamaan diadakan juga rapat seksi-seksi sampai tanggal 11 Juni 1960. Hal ini, dikarenakan terdapat batas waktu yang dimiliki panitia pendiri IAIN hanya sampai akhir bulan Juli 1960. Pada tanggal 13 Juni 1960, akhirnya dari hasil kerja panitia tersebut dapat disampaikan kepada menteri Agama. Laporan hasil kerja panitia tersebut meliputi anggaran keuangan, personalia, rencana pembelajaran dan terkait penempatan kedudukan masing-masing fakultas.¹⁷

Berdasarkan hal itu, maka PTAIN yang berada di Yogyakarta berubah menjadi IAIN Yogyakarta dan sekaligus menjadi PTAIN pusat, sedangkan ADIA di Jakarta dijadikan sebagai fakultas cabang dari IAIN Yogyakarta.

¹⁶ Abdul Aziz, "K.H Muhammad Wahib Wahab: Kementerian Agama Pada Masa Demokrasi Terpimpin," dalam dalam *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, ed. Azyumardi Azra dan Saiful Umam (Jakarta: Litbang Depag, 1998), 195.

¹⁷ IAIN Sunan Kalidjaga, *Buku Tahunan Institut Agama Islam.*, 15-16.

pendiriannya dengan IAIN-IAIN lainnya, walaupun IAIN Sunan Ampel dalam usahanya juga telah melewati berbagai faktor sosial-historis. Adapun setelah secara resmi berdiri, berangsur-angsur IAIN Sunan Ampel melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara memodernisasi pendidikan maupun kelebagaannya. Terlebih seiring dengan munculnya sebuah kebijakan yang dikenal dengan *IAIN Wider Mandate*,²⁵ yang di dalam pelaksanaannya sebagai langkah pengembangan dan keluasan terhadap amanat IAIN untuk menyelenggarakan pendidikan. bahkan, sebagai tindak lanjutnya dalam proses modernisasi di kelebagaannya, IAIN Sunan Ampel melakukan proyek yang lebih cerdas dengan berupaya mengkonversi menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wacana perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Ampel merupakan gagasan besar dan maju dalam menjawab tantangan zaman dan tuntutan masyarakat maupun upaya dalam melakukan integrasi keilmuan untuk mengakhiri adanya dikotomi ilmu. Dalam upaya tersebut, pada akhirnya telah memunculkan perdebatan mengenai nilai plus minus perubahan IAIN menjadi UIN. Oleh karenanya, di dalam civitas akademika IAIN Sunan Ampel pada waktu itu terus dilakukan dialog atau diskusi untuk mencari titik terang dalam penyelesaian perdebatan tersebut. Hingga pada akhirnya, setelah melalui jalan perdebatan yang cukup panjang, persoalan tersebut menemukan hasil atas kesepakatan mengenai pentingnya perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Ampel, dan juga sekaligus menghasilkan rumusan tentang model

²⁵ Husni Rahim, "IAIN dan Masa Depan Islam Indonesia," dalam *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, ed. Komaruddin Hidayat dan Prasetyo (Jakarta: Depag RI, 2000), 423.

berbagai hal, dan karena itu sulit diharapkan bisa memenuhi dan mendukung proses modernisasi. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai prasyarat bagi masyarakat untuk menjalankan program serta dalam mencapai tujuan perbaikan dan kemajuan.

Menurut Azyumardi Azra, untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dirumuskan dengan melihat kelima variabel yang masuk dalam agenda modernisasi pendidikan secara keseluruhan di Indonesia.

1. Ideologis-normatif. Dengan adanya pergeseran orientasi ideologis yang diekspresikan dalam norma-norma, sehingga akhirnya menuntut sistem pendidikan untuk memperluas dan memperkuat wawasan peserta didik. Dalam kerangka ini, pendidikan dianggap sebagai instrumen terpenting bagi pembinaan *nation building*.
2. Mobilisasi politik. Perubahan arah politik dalam kebutuhan modernisasi menuntut pendidikan untuk mencetak peserta didik sebagai pemimpin modernitas dan innovator yang dapat memelihara dan bahkan meningkatkan pembangunan. Dengan demikian, Perguruan Tinggi Islam di tuntut untuk menerapkan kurikulum yang lebih berorientasi ke arah modernisme dan modernitas
3. Mobilisasi ekonomi. Tuntutan akan tenaga kerja mengharuskan sistem pendidikan dapat mencetak SDM yang unggul dan mampu mengisi berbagai sektor lapangan kerja yang tercipta dalam proses modernisasi. Difersifikasi yang terjadi dalam sektor ekonomi, bahkan mengharuskan sistem pendidikan dapat melahirkan SDM yang ahli dalam berbagai

		Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 11, No. 1, 2011	Perguruan Tinggi Islam Negeri (Studi Kasus di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	tinggi tersebut, mempunyai visi dan misi yang hampir sama, yang mana keduanya mengacu pada peraturan dari Menteri Agama dengan berlandaskan Tri Dharma. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam kewenangan pengembangan seperti yang terjadi di IAIN Sunan Ampel dan UIN Maulan Malik Ibrahim, yang dikarenakan oleh status perguruan tinggi yang di sandang keduanya.
4.	Abd. Chayyi Fanani	Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol, 12. No, 2,	Plus Minus Konversi IAIN ke UIN (Studi Responsif Rencana	Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang melandasi konversi IAIN menjadi UIN, yakni: filosofis,

			Ampel Surabaya (Setelah Ahli Status dari IAIN Menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya	merupakan sebuah respon dari perkembangan zaman. Harapan dari kebijakan baru tersebut adalah untuk menambah wawasan keilmuan bagi keunggulan para lulusannya, baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis
6.	Husniyat us Salamah Zainiyati	Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol, 10. No, 1, September 2015	Landasan Fondasional Integrasi keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Sunan Ampel Surabaya	UIN sebagai perguruan tinggi Islam ditekankan dapat melakukan integrasi ilmu, yakni ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajarannya maupun kurikulumnya. Hal ini dikarenakan dalam tradisi intelektual Islam sebenarnya tidak mengenal yang namanya

- Sastra Inggris
 - Sejarah Peradaban Islam
2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Ilmu Komunikasi
 - Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - Bimbingan dan konseling Islam
 - Manajemen Dakwah
 - Pengembangan Masyarakat Islam
3. Fakultas Syariah dan Hukum
- Hukum Keluarga
 - Hukum Ekonomi Syariah
 - Hukum Tata Negara
 - Hukum Pidana Islam
 - Perbandingan Mazhab
 - Ilmu Falak
 - Ilmu Hukum (2019)
4. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- Pendidikan Bahasa Arab
 - Pendidikan Bahasa Inggris
 - Pendidikan Matematika
 - Pendidikan Agama Islam
 - Pendidikan Guru Roudlatul Athfal
 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah

- Manajemen Pendidikan Islam
 - Pendidikan IPA
5. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- Tasawuf dan Psikoterapi
 - Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 - Ilmu Aqidah dan Filsafat
 - Ilmu Hadith
 - Studi Agama-Agama
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ilmu Politik
 - Hubungan Internasional
 - Sosiologi
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Ekonomi Syariah
 - Akuntansi
 - Manajemen
 - Manajemen Zakat dan Wakaf
 - Ilmu Ekonomi
8. Fakultas Psikologi dan Kesehatan
- Psikologi
9. Fakultas Sains dan Teknologi
- Sistem Informasi
 - Arsitektur

dengan memberikan tunjangan bagi staf pengajar maupun pegawainya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjuangan para kiai-kiai atau ulama dalam membesarkan IAIN Sunan Ampel telah banyak mengorbankan tenaga, baik secara pemikiran maupun finansial. Mereka berpandangan bahwa mencerdaskan anak bangsa lebih utama dari pada mengejar urusan pribadi.

Di samping itu, terkait dalam pengorbanan para kiai-kiai maupun tokoh terkemuka di Jawa Timur saat itu adalah dengan terlibat di dalam keanggotaan yayasan yang sudah terbentuk sebelumnya, yang mana mempunyai tugas untuk mencari sebidang tanah bagi keperluan pembangunan gedung/fakultas dan serta berupaya mencari perumahan bagi para dosen. Dikarenakan pinjaman atas ruang perkuliahan kedua fakultas tersebut bersifat sementara dan terbatas hanya untuk beberapa tahun kedepan terhitung dari pembukaan kedua fakultas tersebut. Setelah berusaha cukup keras pada tanggal 27 Juli 1962, akhirnya didapat sebidang tanah seluas 3 hektar, yang terletak di Kecamatan Tandes wilayah Barat Kota Surabaya.

Namun, bersamaan pada waktu itu juga sedang bertepatan ada proyek Pembangunan Semesta Berencana oleh pemerintah dalam tahap pertama membangun Gardu Induk Listrik PLN Eksploitasi Jawa Timur, yang berfungsi menampung pembangkit tenaga listrik PLTU (Pusat Listrik Tenaga Uap) Perak Surabaya. Sedangkan letak atau lokasi yang diperlukan pembangunan tersebut berada di atas tanah yang sudah dibeli oleh pengurus Yayasan Badan Wakaf Kesejahteraan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah. Dengan dasar tersebut, sehingga dari pihak PLN meminta kepada pihak yayasan diharapkan

bahwa tanahnya dapat dibeli, maka dari pihak yayasan dengan senang hati tanah tersebut dapat dibeli oleh pihak PLN. Terlebih pihak yayasan juga menyadari bahwa listrik adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat secara umum, selain itu secara strategis tanah tersebut bagi pihak yayasan juga dirasa kurang cukup mendukung.

Setelah tanah di Kecamatan Tandes tersebut dilepaskan, pihak yayasan kembali berusaha mencari sebidang tanah pengganti. Sehingga akhirnya dari pihak yayasan kembali mendapatkan gambaran sebidang tanah seluas ± 4 Hektar yang terletak di Karang Ketintang Wonocolo, yang sebelumnya juga pernah di tinjau secara langsung oleh Prof. R.H.A Soenarjo dan Prof. A.G. Pringgodigdo S.H., akan tetapi dikarenakan tanah tersebut ternyata bermasalah sehingga didalam prosedur pembeliannya menghadapi kesulitan yang tak dapat diatasi, dengan begitu tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh pihak yayasan.

Selanjutnya untuk ketiga kalinya yayasan kembali berusaha mencari sebidang tanah, yang akhirnya didapatkan sebidang tanah terletak di Jl. A. Yani dengan luas ± 7.95 (7950^2), dimana tanah tersebut merupakan area persawahan, milik 144 warga Wonocolo dan Jemur Wonosari. Dalam proses pembebasan lahan, pihak yayasan mendapat bantuan dan persetujuan dari Kepala Desa Jemur Wonosari, Camat Wonocolo, Walikota Surabaya dan Kepala Dinas Agraria Kota Surabaya. Di samping itu, para warga juga dengan sikap kesadaran telah bersedia memberikan tanah tersebut atas berdasarkan penjelasan mengenai fungsi tanah tersebut yang akan dijadikan

daerahnya masing-masing.⁵⁷ Hal tersebut, supaya diharapkan dapat mengenang perjuangan dari para tokoh atau pahlawan yang sudah berjasa selama ini.

Selain itu, ide atau gagasan mengenai penamaan tersebut juga punya keterkaitan dengan gagasan dari seorang tokoh penting di IAIN Yogyakarta, yakni K.H.R Mohammad Adnan. Ia berpikir bahwa supaya IAIN yang sudah berdiri di berbagai daerah diberikan nama dengan nama para tokoh pahlawan Muslim di Indonesia. Adapun alasan tersebut bahwa salah satu universitas negeri yang ada di Yogyakarta telah memakai nama tokoh penting dari Kerajaan Majapahit, bernama Gajah Mada sebagai simbol penghargaan dan untuk mengenangnya yang telah memiliki reputasi luar biasa di masanya. Sehingga menurutnya, sebaiknya nama PTAIN, yakni IAIN seharusnya diberi nama dengan para *walisongo* yang telah berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara.⁵⁸

Adapun terpilihnya Sunan Ampel sebagai nama IAIN, tentunya tidak dapat dilepaskan dari faktor historis bahwa Sunan Ampel termasuk tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Terlebih yang bertugas untuk berdakwah di daerah Ampel Denta Surabaya. Bahkan, hingga saat ini tempat persinggahannya terus ramai di ziarahi dari berbagai kalangan umat

⁵⁷ Muhaimin Abdul Ghofur, "KH. Saifuddin Zuhri: Eksistensi Agama dalam Nation Building," dalam *Menteri-Menteri Agama RI*, 228.

⁵⁸ Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, "Prof. K.H.R. Mohammad Adnan dan Pemikirannya Dalam Islam", dalam *Lima Tokoh Pengembangan.*, 62.

melakukan perubahan demi mewujudkan perguruan tinggi Islam yang tetap *survive* dan menjadi idaman masyarakat.

Salah satu yang paling penting dalam memodernisasi IAIN yang dimotori oleh Prof. Dr. H. A. Mukti Ali adalah terkait dengan pengayaan pengetahuan bahasa asing, baik Bahasa Arab dan Bahasa Inggris oleh mahasiswa maupun sebagian para alumni IAIN, yang saat itu menurutnya dirasa masih terlihat kelemahan dan kekurangan. Sehingga pada awal tahun 1970-an, ia berupaya mendorong para pengelola IAIN, khususnya Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam untuk mengatasinya dengan jalan mendirikan lembaga bahasa, yang dilengkapi dengan unit laboratorium bahasa.

Gema modernisasi yang disinyalir oleh Menteri Agama tersebut akhirnya juga terdengar sampai ke IAIN Sunan Ampel, bahkan hal itu direspon sangat antusias olehnya dan sekaligus menjadi dorongan untuk berupaya menjadi yang paling terdepan dalam menangkap program modernisasi tersebut. Terlebih IAIN Sunan Ampel juga menyadari bahwa dengan perubahan zaman yang begitu cepat, sehingga membuatnya juga harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang terus bergulir. Oleh karena itu, terkait dalam meningkatkan kualitas mutu ilmiah, maka bahasa asing menjadi faktor sangat penting dan integral dalam membuka wawasan keilmuan.

Adapun langkah awal yang ditempuh oleh IAIN Sunan Ampel adalah dengan mempersiapkan dan melakukan komunikasi kepada pihak dari

pengajuan proposal pendirian Program Doktorat oleh IAIN Sunan Ampel yang digelar dikantor Kementerian Agama di Jakarta. Adapun tujuan dari sidang itu dilakukan dalam rangka untuk menguji dan sekaligus memutuskan terkait persetujuan proposal pendirian Program Doktorat yang diajukan oleh pihak IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang saat itu Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel dibawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Thoha Hamim, MA.

Sedangkan terkait sidang persetujuan proposal diatas, banyak para pimpinan dari beberapa instansi yang hadir dalam sidang tersebut, diantaranya seperti dari Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam (DitpertaIs, yang sekarang bernama Diktis) hingga dua pimpinan dari IAIN yang telah lebih dahulu memiliki Program Doktorat seperti IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sementara dari pihak program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya yang hadir dan bahkan sekaligus menjadi pembicara dalam mempertahankan pengajuan proposal Program Doktorat adalah Prof. Dr. H. Achmad Jainuri, MA selaku asisten direktur saat itu.

Adapun salah satu isu krusial dan kritis didalam sidang saat itu adalah soal terkait mendesak dan layakkah dibuka lagi Program Doktorat di IAIN selain Jakarta dan Yogyakarta. Didalam sidang tersebut muncul berbagai pertanyaan dan perdebatan. Salah satunya adalah pertanyaan yang diajukan oleh rektor dari IAIN Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra selaku penguji dan peserta sidang waktu itu adalah sebagaimana berikut: “Untuk apa dibuka Program Doktorat lagi? Yang sudah ada dan berdiri selama ini saja masih ada

banyak kekurangan; kenapa mau bikin program S3 lagi di luar Jakarta dan Yogyakarta? Daripada kita mendirikan lagi program S3 di IAIN Surabaya, lebih baik kita benahi saja program S3 di IAIN Jakarta dan IAIN Yogyakarta.”

Dengan sigap Prof. Dr. Achmad Jainuri langsung menjawab berbagai pertanyaan dari peserta sidang yang hadir dengan argumennya yang sangat cerdas: “kalau memang IAIN Jakarta dan IAIN Yogyakarta sudah diberi kesempatan cukup lama untuk menyelenggarakan program S3, dan hasilnya masih menyisakan banyak kekurangan, kenapa energi kita hanya terfokus ke dua perguruan tinggi itu? Kenapa kita tidak mencari peluang lain dengan memberi kesempatan IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk menyelenggarakan program S3 yang sama?”

Lebih lanjut kemudian Prof. Dr. Achmad Jainuri memperjelas keterangannya di depan para peserta sidang. Terkait kelebihan yang dimiliki IAIN Sunan Ampel dalam menyelenggarakan program S3, terlebih mengenai arah kajian riset yang akan dilakukan. Dengan memberikan *statement* sebagaimana berikut: “kita ini beda dengan yang sudah ada di IAIN Jakarta dan Yogyakarta. Salah satunya, kajian riset yang dikembangkan di program S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya tidak mengobral studi literer. Riset-riset untuk disertasi S3 justru diarahkan ke kajian lapangan. Itu yang akan menjadi kekuatan dan sekaligus pembeda dari kajian disertasi yang ada di IAIN Jakarta dan Yogyakarta.” Alur dari cerita persidangan ini senada dengan yang

Fakultas Tarbiyah membuka Prodi dengan konsentrasi Pendidikan Matematika (Tadris Matematika).

Setelah beberapa tahun berjalan menyangkut perkuliahan prodi-prodi umum yang berdasarkan atas program *Wider Mandate* di IAIN Sunan Ampel. Tidak berselang lama pada tahun 2001 keluar Surat Keputusan dari Departemen Pendidikan Nasional No. 241/D/T/2001 dan SK direktorat Jenderal Pembinaan No. E.1/PP.00.9/J/924/2001 yang bertanggal 24 juli 2001 tentang tindak lanjut program *Wider Mandate*. Kemudian dilanjutkan dengan surat rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional No. 2981/D/T/2001 tanggal 18 September 2001 tentang rekomendasi pembukaan program studi strata S1 pada IAIN dan STAIN dalam rangka *Wider Mandate* di bawah lingkungan pengelolaan Kementerian Agama, yang berisi tentang peraturan pembukaan ijin kewenangan penyelenggaraan program studi umum.

Adapun dampak dari adanya keputusan diatas, seperti salah satunya yang terkait dengan Prodi Ilmu Komunikasi, Sosiologi dan Psikologi merupakan prodi umum yang bernaung di bawah payung Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Bahwa mengenai penyelenggaraan program studi ini tetap dapat dilanjutkan dan memperoleh ijin dengan berdasarkan SK Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dari Kementerian Agama No. E/283/2001 tanggal 29 November 2001 tentang pemberian ijin Prodi Ilmu

dalam lingkup PTKIN yang sangat kecil di banding dengan perguruan tinggi negeri umum.

Memasuki awal abad ke-21, keinginan dari cita-cita Prof. Dr. Harun Nasution akhirnya dapat terealisasi dengan muncul beberapa IAIN/STAIN berhasil mengkonversi dirinya menjadi UIN. Perubahan secara kelembagaan tersebut juga akhirnya terdengar hingga ke PTKIN yang berada di Kota Surabaya. Sehingga hal tersebut juga menjadi dorongan motivasi dan akhirnya memunculkan upaya untuk mengkonversi IAIN menjadi UIN Sunan Ampel, yang sesungguhnya genderang tersebut sudah didengung-dengungkan semenjak lama, terlebih ketika muncul program *Wider Mandate* pada tahun 1990-an. Keinginan perubahan secara kelembagaan ini, sebenarnya juga berdasarkan atas dirasanya masih terdapat kekurangan terkait hanya diperbolehkannya membuka prodi-prodi umum yang secara terbatas, sehingga kemudian dari prodi-prodi umum yang sudah ada sebelumnya diupayakan bisa dapat mengarah ke arah perubahan secara keilmuan maupun kelembagaan.

Adapun keinginan kuat dalam perubahan secara kelembagaan IAIN menjadi UIN yang terus digulirkan di lingkungan civitas akademika IAIN Sunan Ampel pada waktu itu, telah dimulai semenjak dibawah kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir. Akan tetapi keinginan tersebut kemudian mempunyai kendala dengan terbenturnya terkait moratorium oleh Menteri Agama saat itu yang dijabat oleh M. Maftuh Basyuni (2004-2009) dengan kebijakan terkait pembatasan cukup enam IAIN yang berubah menjadi UIN.

pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dihadiri oleh Prof. Dr. Machasin yang merupakan Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Dr. Afandi Muchtar selaku Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam, Dr. Ahmad Jayadi sebagai Kasubdit Kerjasama dan Andri Subandriyah, yang pada waktu itu banyak membantu di dalam proses negosiasi dengan beberapa Kementerian terkait. Sedangkan dari pihak IDB hadir Dr. Beddi Abdurahman, Dr. Abdi Abdillahi, dan Dr. Loay Faruq serta *Field Representatif* IDB Indonesia, Dr. Makhiani.

Dalam kesempatan itu, pihak IDB, Dr. Beddi Abdurahman menerangkan bahwa IDB memiliki konsern terhadap pengembangan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam. Dia menjelaskan bahwa melalui skema program IDB, maka beberapa perguruan tinggi Islam yang sudah didanai IDB ternyata berkembang sangat pesat. Dr. Beddi sangat mendukung terhadap pengembangan IAIN Sunan Ampel ke depan dengan berbagai perubahan fisik dan infrastrukturnya. Oleh karena itu, pengembangan fisik IAIN Sunan Ampel dengan bekerjasama dengan IDB menjadi sebuah program utama. Hal ini seperti menurut ungkapan Prof. Dr. H. Nur Syam:

“Pengembangan kelembagaan berdasarkan dana dari IDB itu semua kita kerahkan ke sana, sehingga dalam bahasa saya nyatakan bahwa perubahan dari IAIN ke UIN itu bukan hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan internal tentang perlunya perubahan di era sekarang saat ini. Tapi juga dalam rangka menjemput pendidikan yang lebih baik di masa akan datang, selain itu sebenarnya IDB juga menginginkan perubahan ini. Oleh karenanya salah satu diantara point penting proposal kita ke

2010, sedikitnya 188 orang pengajar dari IAIN Sunan Ampel telah menempuh program doktoral dan magister, baik di dalam maupun luar negeri. Adapun jumlah angka tersebut meliputi, 100 orang sedang menempuh program doktoral dan 18 lainnya menempuh program magister. Sedangkan bidang studi yang ditempuh pun tidak hanya lingkup *Islamic Studies* saja, tapi juga yang berbasis bukan *Islamic Studies*. Terutama yang studi di luar negeri, yang menjadi negara tujuan belajarnya adalah Amerika, Kanada, Australia, Jerman, Belanda, dan Mesir. Selain menempuh program S2 dan S3, tidak sedikit juga para dosen yang mengikuti program *short course* dan *research fellow*, di antaranya seperti ke Australia dan Mesir. Sehingga secara bertahap sebanyak 90 pegawai IAIN Sunan Ampel juga ikut dalam kegiatan *short course* di dua negara tersebut. Adapun dalam rencana tersebut sudah dimulai semenjak pada tahun 2010 yang sedikitnya sebanyak 15 orang dengan tujuan masing-masing, hingga kemudian rencana program tersebut diharapkan dapat diteruskan dan berlanjut hingga tahun 2012.

Adapun terkait kerjasama dengan Australia, secara khusus IAIN Sunan Ampel telah melakukan kerjasama dengan University of Melbourne, dengan tujuan agar dapat melatih para staf pengajar IAIN dalam bentuk *Workshop on Research Management in Islamic Higher Education*. Kerjasama itu dituangkan dalam perjanjian tertulis atas kesepakatan (MoU) yang ditanda tangani langsung oleh rektor IAIN Sunan Ampel, pada awal

Kedua, dengan peningkatan jumlah mahasiswa yang begitu drastis, maka secara otomatis juga terjadi peningkatan bagi pendapatan universitas. Terutama jika dilihat dari kurun waktu tiga tahun terakhir di seluruh UIN telah berhasil menerapkan sistem manajemen keuangan sendiri dengan model BLU, sehingga universitas mempunyai peluang tinggi untuk membuka berbagai jenis layanan yang dapat meningkatkan pendapatannya. Sehingga hampir di seluruh UIN sudah memiliki *Training Center* atau bahkan mempunyai sebuah hotel pendidikan yang kemudian dapat disewakan untuk umum, dan begitu juga dengan berbagai jenis usaha lainnya yang dapat menguntungkan secara *financial*.

Ketiga, dengan hadirnya berbagai fasilitas pendidikan di UIN, khususnya bagi keempat UIN yang menjadi target penelitian telah mengalami peningkatan drastis. Seperti contohnya di UIN Riau sudah memiliki fasilitas pendidikan berupa tanah seluas 150 hektar, UIN Makasar 40 Hektar. Demikian juga dengan UIN Jakarta dan Yogyakarta. Sementara fasilitas secara fisik seperti gedung yang dibangun tidak kalah megahnya dengan universitas-universitas unggulan lainnya, selain itu terdapat peralatan yang cukup canggih dalam menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Keempat, dalam suasana akademik sendiri semakin terbangun dengan terjadinya konversi ke UIN, demikian juga dalam perihal peningkatan produktifitas dan etos kerja bagi para dosen dan karyawan. Dengan adanya peningkatan produktifitas tersebut juga tidak lepas dari kondisi lingkungan

yang nyaman, fasilitas pendidikan yang memadai, serta banyaknya kegiatan sebagai akibat dari terjadinya konversi.

Kelima, adapun salah satu aspek yang memberikan dampak positif dengan adanya konversi ke UIN adalah semakin banyaknya institusi yang membutuhkan jasa UIN dan semakin gencarnya pimpinan UIN untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk keperluan membangun Tri Dharma. Dengan demikian, maka juga semakin banyaknya terjalin kerjasama yang berakibat juga pada peningkatan PNBP dan kepercayaan masyarakat terhadap UIN sebagai institusi pendidikan tinggi.¹¹⁸

Kemudian tidak kalah pentingnya juga di dalam kekompakkan yang dilakukan oleh Tim UIN pada waktu itu, juga terbagi dengan membagi tugas untuk melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Adapun tugas tersebut adalah dengan melakukan pembagian dalam kerjasama terhadap beberapa lembaga, baik pendidikan maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan usaha perubahan IAIN menjadi UIN. Seperti salah satunya dengan melakukan kerjasama kepada prodi/jurusan ilmu arsitektur yang berada di Universitas Petra dan ITS. Kemudian terkait bahwa IAIN Sunan Ampel ketika menjadi UIN berkeinginan untuk membuka prodi kesehatan, maka dilakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Surabaya, seperti Rumah

¹¹⁸ Abdul chalik, *Filsafat Ilmu: Pendekatan Kajian Keislaman* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2015), 151-157.

mengembangkan potensinya menjadi perguruan tinggi yang lebih baik dan berkualitas.

Pada tahun 1970-an, IAIN yang merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam dengan terbilang baru eksis, mulai dihadapkan dengan sebuah tantangan global mengenai pembaruan atau modernisasi sebuah pendidikan. Yang dimana hal tersebut, berdasarkan dengan seiringnya tantangan akan munculnya pemikiran-pemikiran baru yang malanda dunia pendidikan Islam, yang tak terkecuali juga telah menjadi tantangan bagi IAIN Sunan Ampel Surabaya pada waktu itu yang diharapkan bisa merespon dengan upaya dapat merubah cara berpikir keilmuannya untuk terus berkembang sesuai tuntutan zaman.

Namun, kenyataannya bahwa kualitas semua PTKIN yang ada pada waktu itu terbilang masih cukup rendah dengan semakin kentara manakala kita membaca peta persaingan perguruan tinggi secara lokal maupun global. Sebagaimana *stigma* oleh masyarakat umum bahwa IAIN masih ketertinggalan jauh dengan perguruan-perguruan tinggi seperti UGM, UI, UNAIR dan sebagainya. Hingga hal tersebut berlanjut dengan memasuki era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan informasi, sehingga IAIN/STAIN semakin terlihat ketertinggalanya di mana masih banyak indikator perankingan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar PTKIN sebagai universitas idaman masyarakat dan menjadi universitas berkelas dunia.

Kondisi diatas kemudian berlanjut dengan munculnya berbagai perguruan tinggi di dunia, tak terkecuali juga sebagian perguruan tinggi di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai *world class university* (WCU). Konsep WCU sebenarnya bukanlah gagasan yang baru, ia sudah lama menjadi bahan perbincangan di antara perguruan-perguruan tinggi di dunia terutama dengan seiring berkembangnya arus globalisasi yang akhirnya membawa perubahan bagi dunia pendidikan secara global. Maka dengan munculnya era globalisasi tersebut telah menjadi sebuah penawaran nilai-nilai baru, sekaligus menentang konsep-konsep lama tentang segala hal yang selama ini menjadi rujukan berbagai perguruan tinggi di dunia. Kondisi atau keadaan tersebut muncul dengan seiring diperkenalkannya sistem perankingan universitas-universitas ternama di dunia oleh sejumlah lembaga perankingan dunia seperti *Times Higher Education*, *Webometrics*, *Shanghai Jiao Tong*, *QS World University Rankings* dan sebagainya. Dari sinilah WCU terbentuk dan menjadi filosofi pelaksanaan menuju perguruan tinggi berkelas dunia.

Menurut Koh Aik Khoon, et al. yang dikutip oleh Masdar Hilmy, bahwa terdapat beberapa karakteristik WCU, di antaranya: *Pertama*, pandangan dunia. Sebuah keharusan bagi semua perguruan tinggi yang hendak menjadi WCU adalah harus memiliki pandangan dunia yang visioner, progresif, dan futuristik, hal ini supaya dapat tetap mengikuti dan relevan dengan perkembangan zaman.

Kedua, peluang. Bagi setiap perguruan tinggi yang ingin menjadi WCU di haruskan mempunyai kemampuan dalam membaca peluang. Hal ini

supaya memudahkannya untuk dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka mengembangkan dan memperluas peran-peran akademisnya di masyarakat, baik di bidang inovasi pembelajaran maupun di bidang penelitiannya. Di karenakan, bagi universitas-universitas yang sudah mempunyai reputasi di kedua bidang tersebut cenderung lebih dilirik oleh lembaga-lembaga di luar dirinya untuk berkolaborasi dalam melakukan kerjasama di berbagai bidang.

Ketiga, penelitian. Di hampir semua universitas ternama di dunia, penelitian merupakan suatu hal yang utama bagi masuknya keuangan-keuangan yang akan menjadi penopang inovasi-inovasi di universitas yang bersangkutan, baik di bidang pembelajaran maupun penelitian. Artinya, reputasi sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh banyaknya proyek penelitian yang dihasilkan melalui jejaring akademiknya dengan pihak luar. Oleh karena itu, Semakin banyak proyek penelitian yang didapat, maka semakin baik reputasi sebuah universitas. Demikian juga sebaliknya, kalau sebuah universitas tidak banyak menerima proyek penelitian, maka akan dinilai rendah kinerja akademiknya, bahkan akan mempunyai pengaruh dalam reputasi akademiknya di level internasional.

Keempat, proses pembelajaran. Seluruh WCU harus mempunyai tradisi pembelajaran yang luas dan beragam. Seperti harus ada hubungan baik dalam menumbuhkan semangat yang akan dibangun antara pengajar dan mahasiswa, sehingga dapat menciptakan sebuah terobosan dan pencairan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contohnya

adalah seperti yang terjadi di sebagian universitas ternama di dunia, yang merubah sistem pembelajarannya dengan memberlakukan model-model pembelajaran baru *e-learning* yang lebih banyak mengandalkan pertemuan *virtual* antara pengajar dan mahasiswa, dan tidak banyak lagi mengandalkan sistem pembelajaran di dalam ruangan kelas.

Kelima, dorongan. Sebuah WCU harus secara terus menerus dapat mendorong dan menekan dirinya sendiri dengan mengarahkan peningkatan kualitasnya menuju ke peringkat yang terbaik. Oleh karena itu, bagi pihak universitas diharapkan setiap saat dapat mengevaluasi dan merevisi kondisi kinerja kelebagaannya dalam rangka menyesuaikan dirinya dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Maka, dengan strategi seperti ini, setidaknya akan mendorong semangat kerja seluruh civitas akademika supaya dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi peningkatan kinerja kelembagaan.

Keenam, kekompakan. Setajam apapun friksi politik yang ada di lingkungan universitas, kekompakan kinerja sebuah tim di sebuah universitas tetap harus menjadi fokus utama supaya dapat menghadapi tuntutan dan tantangan dari pihak luar. Pihak pimpinan sebuah universitas harus mampu membangun kebersamaan dan kekompakan di tengah keberagaman kepentingan para stafnya dengan cara, misalnya, mengkontruksi lembaga-lembaga lain sebagai *common competitor* (jika bukan sebagai *common enemy*) bagi peningkatan kinerja kelembagaan. Sehingga mereka diajak secara bersama-sama untuk memikirkan yang terbaik bagi peningkatan kualitas perguruan tinggi terkait.

Ketujuh, kepemimpinan akademik. Sumber daya manusia yang terbaik merupakan jantung dari WCU, karena mereka akan bisa memerankan diri sebagai pemimpin di bidang akademiknya masing-masing dalam rangka melakukan inovasi-inovasi di bidang akademiknya. Oleh karena itu, di dalam proses rekrutmen staf pengajar baru harus berdasarkan pada *merit system*, sebuah cara untuk menjangkau orang-orang atau pegawai baru yang didasarkan pada rekam-jejak kinerjanya, sehingga bukan hanya atas dasar favoritisme belaka. Dengan demikian, akan muncul SDM yang mampu menciptakan komunikasi akademik yang baik di ruang publik dan bahkan akan dilirik oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Sehingga pastinya dari hal tersebut akan menjadi investasi jangka panjang bagi kebesaran kelembagaan terkait.

Kedelapan, aspirasi. Sebuah WCU harus mempunyai aspirasi yang tinggi dalam peningkatan di bidang akademiknya dengan diterjemahkan melalui visi dan misi yang mencerahkan serta untuk mudah dapat di pahami oleh segenap *stakeholder*. Sebuah aspirasi yang menggambarkan mimpi bersama segenap civitas akademika dalam rangka menggapai sebuah kondisi yang di cita-citakan bersama. Sehingga hal tersebut juga dapat mengantarkan mahasiswa meraih perubahan ke arah yang lebih baik dalam jenjang kariernya.

Kesembilan, keserjanaan. Sebuah WCU harus membangun budaya keserjanaan yang berdasarkan melalui prinsip-prinsip penghargaan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dikarenakan ketika sebuah perguruan tinggi masih belum mampu memberikan penghargaan terhadap ilmu

Dampak dari permainan di atas akhirnya terumuskan sebagai *blue-print* WCU dan juga telah menjadi pedoman bagi mayoritas perguruan tinggi di dunia. Sehingga akibatnya, di hampir semua perguruan tinggi yang ada di dunia menjadi berlomba-lomba untuk dapat meraih status WCU dengan jalan menginvestasikan biaya yang terbilang tidak sedikit untuk pengembangan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) dan semacamnya.

Untuk menjadi universitas berkelas dunia dan agar dapat menggapai peringkat yang tinggi dalam daftar perankingan dunia bukanlah sebuah utopia belaka bagi perguruan tinggi di Indonesia, tak terkecuali bagi IAIN/UIIN. Sebagaimana pada kenyataannya pada tahun 2010, *website* milik IAIN Sunan Ampel menyelinap masuk di daftar perankingan dunia. Hal ini menjadi suatu yang tak terduga, seperti oase di tengah gurun pasir bahwa IAIN Sunan Ampel menjadi satu-satunya PTKIN yang muncul di urutan 7.717 di antara 18.000 universitas di dunia versi *Webometrics*. Sementara menurut klasifikasi dari tingkat nasional, IAIN Sunan Ampel tercatat dalam urutan ke-57 dibawah sejumlah perguruan tinggi negeri umum maupun swasta.

Pada rilis kedua bulan Juli 2010 *Webometrics*, peringkat ranking IAIN Sunan Ampel semakin naik menjadi urutan ke-6.023 dari jumlah 12.000 nominator universitas se-dunia. Sementara di level nasional, ranking IAIN Sunan Ampel juga ikut merangkak naik menjadi urutan ke-48 dari nominasi 140 perguruan tinggi. Padahal, dari menurut data April 2010 jumlah perguruan tinggi di Indonesia telah mencapai 3.614 perguruan tinggi, meliputi 3.101 perguruan tinggi umum dan 513 perguruan tinggi agama Islam (PTAI).

dalam masyarakat luas yang memiliki *statement* bahwa agama dan ilmu pengetahuan yang sifatnya umum adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Keduanya mempunyai wilayah sendiri-sendiri, terpisah antara satu dan lainnya, baik dari segi objek material, metode penelitian, dan kriteria kebenaran. *Statement* tersebut pada akhirnya juga sampai ke ranah dunia pendidikan dengan melahirkan sebuah dikotomi keilmuan yang menjadi masalah utama bagi dunia pendidikan Islam.

Dikotomi ilmu antara ilmu agama dan non-agama, sebenarnya bukan sebuah hal yang baru. Di dunia Islam sebagaimana keterangan Mulyadhi Kartenegara di dalam bukunya bahwa sesungguhnya keilmuan yang berkembang di dalam tradisi Islam sudah terdapat namanya dikotomi ilmu semenjak seribu tahun silam. Akan Tetapi, dikotomi tersebut tidak menimbulkan cukup banyak permasalahan dalam sistem pendidikan Islam, hingga kemudian sistem pendidikan sekuler (Barat) mulai diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme. Hal ini terjadi, karena sekalipun dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan non-agama itu telah dikenal dalam karya-karya klasik, seperti yang ditulis Al-Ghazali (w. 1111) dan Ibn Khaldun (w. 1406), tetapi mereka tidak pernah mengingkari dan bahkan tetap mengakui validitas dan status ilmiah masing-masing kelompok keilmuan tersebut. Hal tersebut terlihat berbeda dengan dikotomi yang dikenal di dunia Islam dengan sains modern Barat yang sering menganggap rendah status keilmuan ilmu-ilmu keagamaan. Sains modern Barat menganggap bahwa ilmu agama tidak bisa dipandang ilmiah karena sebuah ilmu baru bisa dikatakan ilmiah apabila

Sehingga akhirnya, bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman berakibat tidak bisa mengalami keleluasan akademik, dan bahkan cenderung mengalami kebuntuhan.

Adapun upaya mencari alternatif solusi atas kebuntuhan pengembangan keilmuan keislaman tersebut sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para Intelektual Muslim. Bentuk konkretnya adalah dengan berupaya membongkar tradisi atau mencoba mendialogkan kembali tradisi tersebut dengan keilmuan modern. Dengan demikian, diharapkan lahir berbagai gagasan baru dan maju sebagai peletak dasar penemuan paradigma keilmuan keislaman yang lebih mencerahkan. Adapun Intelektual Muslim dengan proyek pengembangan keilmuan keislaman tersebut diantaranya adalah Fazlur Rahman dengan neo-modernisme Islam melalui pemahaman Al-Quran “*Double Movement*”, Naguib Al-Attas, Ismail Raji Al-Faruqi dengan konsep “Islamisasi Ilmu Pengetahuan”, Muhammad Arkoen dengan “Kritik Nalar Islam”, Seyyed Husein Nasr dengan Paradigma “Spiritualitas dan tradisional Islam”, dan Hasan Hanafi dengan konsep “Islam Kiri”.

Di samping itu juga masih banyak Intelektual Muslim lainnya yang beberapa diantaranya adalah Asghar Ali Engineer dengan konsep “Teologi Pembebasan”, Mahmud Thoha dan Ahmed An-Naim dengan konsep “Dekonstruksi Syariah”, Nasr Hamid dengan “Kritik Teks Keagamaan pemahaman Al-Quran ‘, Muhammad Abid al-Jabiri dengan konsep/teori “bayani, irfani, burhani”, dan Abdul Karim Sorosh dengan teori “penyusutan dan pengembangan Islam”. Selain itu di kalangan Intelektual Muslim di

hidup di masyarakat yang akan datang dengan seiring semakin lama semakin sulitnya tantangan dan tuntutan kehidupan yang tidak dapat diprediksi.

Dengan demikian, arus perubahan zaman yang menjadi tuntutan masyarakat secara umum bagi IAIN/STAIN dalam pengembangan keilmuan diharapkan harus merujuk kepada peningkatan kualitas dan keterampilan mahasiswa, sehingga lulusannya dapat terserap dalam semua sektor publik. Jika tak diarahkan pengembangannya kepada peningkatan kualitas, maka IAIN/STAIN akan kehilangan pengaruhnya di dalam masyarakat. Terlebih di era globalisasi ini, kompetisi sumber daya manusia sangat ketat, hanya sumber daya manusia yang berkualitaslah yang akan mampu bersaing di era globalisasi, sementara mereka yang tidak memiliki kualitas akan tergilas oleh roda perkembangan zaman.

Oleh karena itu, proses panjang modernisasi IAIN Sunan Ampel yang akhirnya berujung pada perubahan kelembagaannya menjadi UIN Sunan Ampel merupakan sebuah proses kesadaran yang lebih maju dan juga hal tersebut sejalan dengan tuntutan umat Islam yang menghendaki adanya pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan berkualitas tinggi, sebagai akibat dari adanya tuntutan dari era globalisasi yang menghendaki lahirnya manusia-manusia yang unggul dan mampu merebut peluang dalam situasi dan kondisi yang penuh tantangan. Selain itu, dengan adanya perubahan orientasi hidup dari yang semula semata-mata bersifat ukhrawi, menjadi orientasi hidup yang menghendaki keseimbangan dengan kehidupan duniawi. Hal ini yang menyebabkan masyarakat, terutama bagi

- Humaidi. *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi: Pendasaran Filosofis bagi Relasi Sains, Filsafat, dan Agama*. Jakarta: Sadra Press, 2015.
- IAIN News. Media Komunikasi dan Informasi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Edisi Kwartal Kedua November 2010.
- IAIN Sunan Ampel. *22 Tahun IAIN Sunan Ampel*. Surabaya: IAIN Press, 1987.
- _____. *Lustrum ke-1 IAIN Sunan Ampel*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1970.
- _____. *Lustrum Ke-2 IAIN Sunan Ampel*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1975.
- _____. *Lustrum ke-3 IAIN Sunan Ampel*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1980.
- _____. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Dua dan Strata Satu (S-1)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2002.
- _____. *Tiga Tahun Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 1965-1968*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1968.
- IAIN Sunan Kalidjaga. *Buku Tahunan Institut Agama Islam Negeri Jogjakarta 1960-1962*. Jogjakarta: IAIN Jogjakarta, 1962.
- _____. *Sewindu Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1968.
- IAIN Syarif Hidayatullah. *Tiga Puluh Tahun IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Lustrum VI*. Jakarta: Departemen Agama, 1987.
- Jabali, Fuad dan Jamhari, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Jainuri, Achmad. *Orientasi Ideologi gerakan Islam*. Surabaya: LPAM, 2004).
- Kartanegara, Mulyadhi. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Arasy Mizan, 2005.
- Kosim, Mohammad. *Pendidikan Guru Agama di Indonesia: Pergumulan dan Problem Kebijakan 1948-2011*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2012.
- Kota Surabaya Dalam Angka 2018*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2018.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya II*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Luts, M. Natsir. et al, *Paradigma Baru: Reformulasi Pendidikan Tinggi Islam*. Jakarta: UI-Press, 2004.

- Mahendra, Yuzril Ihza. *Studi Islam di Timur dan Barat: Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Islam Indonesia*. Majalah Ulumul Quran: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan. Vol. 5, No. 3, 1994.
- Minhaji, Akh. *PTKIN: dan Masa Depan Studi Islam*. Republika. 17 Maret 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mughni, Syafiq A. *Nilai-nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mustopo, Moehamad Habib. *Kebudayaan Islam di Jawa Timur: Kajian Beberapa Unsur Budaya Masa Peralihan*. Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Muzakki, Akh. et al. *Dampak Konversi IAIN ke UIN: Pengalaman UIN Percontohan se-Indonesia*. Yogyakarta: Impulse, 2015.
- Nafis, Muhamad Wahyuni. et al. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*. Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- Nasiruddin. *Kebijakan Pengembangan Program Studi di UIN Sunan Ampel Surabaya: Setelah Alih Status dari IAIN Menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya*. Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Nasution, Harun. *Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- _____, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Bogor: Kencana, 2003.
- Natsir, M. *Capita Selecta*. Bandung: Sumup, 1961.
- Profil Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Qodratillah, Meity Taqdir. et al. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Kemendikbud, 2011.
- Rencana Induk Pengembangan IAIN 25 Tahun*. Jakarta: Ditbinperta Depag, 1983.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Safioedin, Asis. *Membina Bahasa Indonesia*. Bandung: Alumni, 1987.
- Sardar, Ziauddin. *Masa Depan Islam*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Simon, Hasanu. *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

